

Kata Pengantar



Mengakhiri kuartal pertama tahun 2011, semakin terlihat berbagai upaya konkret inisiatif-inisiatif REDD+ di Indonesia. Sejak Januari 2011, UN-REDD Programme Indonesia

telah menghasilkan hal-hal yang berdampak positif pada upaya implementasi Pengurangan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau REDD+) Indonesia.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan REDD+, UN-REDD Programme Indonesia telah menghasilkan Rekomendasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC). Upaya konsensus ini sudah melalui beberapa diskusi dengan berbagai kamar masyarakat.

Di Provinsi Percontohan, beberapa hal juga telah terjadi, di antaranya pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah. Kemudian Pokja itu pun mulai melakukan tugas mereka, salah satunya menyusun kriteria dan indikator daerah proyek percontohan di tingkat kabupaten/kota.

Di Jakarta sendiri UN-REDD Programme Indonesia aktif mengikuti beberapa upaya penyadartahuan masyarakat tentang perubahan iklim dan upaya-upaya mitigasinya. Beberapa insititusi pemerintah telah melakukan pameran bertema lingkungan agar masyarakat mengenal program-program mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Di antaranya, *Indogreen Expo 2011* yang dimotori Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan *Climate Change Indonesia 2011 Education Forum and Expo* yang diselenggarakan Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Kami mengajak pembaca untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami lainnya melalui *Newsletter* edisi ketiga ini. Salah satu kegiatan UN-REDD Programme Indonesia yang merupakan faktor penentu langkah menuju sukses adalah Rapat Dewan Eksekutif yang dihadiri Duta Besar Norwegia, *His Excellency Eivind S. Homme* (Mei 2011). Kami harap pembaca dapat mengambil hikmah dari laporan-laporan kegiatan tersebut, yang nantinya akan menjadi motivasi untuk berpartisipasi dalam gerakan mensukseskan REDD+. Selamat membaca.

Yuyu Rahayu
National Programme Director

Daftar Isi

| | |
|---|---|
| Kata Pengantar | 1 |
| Indogreen Expo 2011 | 1 |
| Kriteria dan Indikator Aktivitas Percontohan | 2 |
| Pembelajaran dari Brasil | 2 |
| Bersama-sama Menanggulangi Emisi Gas Rumah Kaca | 3 |
| Penguatan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah | 3 |
| Rapat Dewan Pengarah VI UN-REDD | 4 |
| Rekomendasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan | 5 |
| Konsultasi Peta Jalan Kehutanan di Kalimantan Tengah | 5 |
| Pertemuan Kedua Project Executive Board UN-REDD Programme Indonesia | 6 |
| Penghargaan Climate Change Indonesia 2011 Education Forum and Expo | 6 |
| Kata Mereka..... | 7 |
| REDD+ dan Tokoh-tokoh Agama..... | 7 |
| Kabar UN-REDD Programme Indonesia | 7 |
| Publikasi Terbaru | 8 |

»» Indogreen Expo 2011

Indogreen Forestry Expo, sebuah pameran kehutanan yang dimotori oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara acara, PT Wahyu Promocitra, diadakan untuk yang kedua kalinya di Jakarta Convention Center pada tanggal 15 – 18 April 2011. Pameran yang dibuka oleh Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan ini mempromosikan potensi besar yang dimiliki sektor kehutanan dan upaya konservasinya. Selain itu, pameran ini juga memperlihatkan kepada publik, program-program serta capaian-capaian pemerintah RI dan mitra-mitranya dalam mengelola hutan secara lestari.

Mempertimbangkan dampak positifnya, UN-REDD Programme Indonesia berpartisipasi di pameran tersebut melalui kerja sama dengan Pusat Standardisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan RI dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk turut mendidik masyarakat umum

tentang perubahan iklim dan upaya-upaya mitigasinya, Pustanling membuat pojok yang diberi nama Rumah Iklim. Di Rumah Iklim itu, Pustanling menaruh berbagai informasi tentang upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan Kementerian Kehutanan RI dan mitra-mitranya, termasuk UN-REDD Programme Indonesia.

Untuk menambah wawasan para pengunjung, UN-REDD Programme Indonesia juga berpartisipasi mengadakan diskusi santai dan kuis berhadiah tentang perubahan iklim bersama mitra-mitra lain di Rumah Iklim Pustanling. Para pengunjung tampak menunjukkan rasa ingin tahu mereka tentang program-program yang dipublikasikan. Melalui acara semacam ini, diharapkan rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya peran hutan dalam kehidupan manusia, dan tergerak untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya menjaga lingkungan.



▲ Keterangan foto :



▲ Keterangan foto :

Kriteria dan Indikator Aktivitas Percontohan

Tahapan kesiapan (*readiness*) REDD+ memerlukan adanya beberapa komponen, di antaranya strategi nasional, kelembagaan, sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measuring, Reporting, Verification* atau MRV), serta aktivitas percontohan (*Demonstration Activities* atau DA). Komponen DA memiliki peran penting yang berbeda dengan komponen lainnya, terutama karena dirancang untuk menggambarkan penerapan REDD+ secara nyata di lapangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- bagaimana hutan bisa memenuhi fungsi mitigasi perubahan iklim melalui pilar-pilar yang ada dalam REDD+?
- bagaimana para pemangku kepentingan,

termasuk masyarakat, berperan sehingga REDD+ berjalan?

Keberhasilan DA dapat menjadi pembelajaran dan rujukan penerapan REDD+ secara lebih luas dan lebih baik di masa depan. Oleh karenanya, pemilihan DA bukan hal yang mudah. Diperlukan pertimbangan yang matang agar potensi kegagalan dapat diminimalkan, sementara potensi keberhasilan dapat ditingkatkan. Di tingkat nasional, UN-REDD Programme Indonesia mendukung upaya-upaya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dalam mengembangkan kriteria dan indikator yang akan digunakan dalam pemilihan DA. Hasil-hasil dari pembahasan kriteria dan indikator



▲ Keterangan foto :

di tingkat pusat kemudian dikonsultasikan ke beberapa provinsi untuk mendapat masukan, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Di tingkat sub-nasional, UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah mengembangkan kriteria dan indikator untuk pemilihan kota/kabupaten. Ini dilakukan oleh Pokja dengan mengacu pada kriteria dan indikator yang dikembangkan di tingkat pusat, namun mengakomodasi kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah. Aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan sosial merupakan perhatian utama dalam pembahasan Pokja. Dengan keanggotaan Pokja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, penetapan kriteria dan indikator ini mencerminkan pandangan yang komprehensif, menjadikannya rujukan untuk melihat kelayakan kota/kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai lokasi pelaksanaan REDD+.



◀ Keterangan foto :

Pembelajaran dari Brasil

Di dunia internasional Brasil dikenal mampu mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan. Keberhasilan Brasil ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuannya menghentikan pembukaan lahan untuk pertanian dan peternakan, serta melakukan moratorium pembukaan lahan hutan untuk tanaman kedelai (penghasilan utama Brasil dari sektor pertanian).

Untuk memahami lebih jauh keberhasilan Brasil ini, UN-REDD Programme Indonesia telah mensponsori Bapak Jansen Tangketasik, staf Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) yang bertugas di Kalimantan Tengah, untuk bergabung dengan rombongan Gubernur Kalimantan Tengah yang melakukan studi banding ke Brasil. Ada beberapa pembelajaran menarik yang dapat dipetik dari kunjungan tersebut.

Dalam menjalankan program Penurunan Tingkat Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau REDD+), Brasil tidak

terlalu memikirkan mekanisme REDD+ yang masih diperbincangkan di dunia internasional. Brasil lebih menekankan program pengurangan degradasi hutan, pengurangan deforestasi, pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management* atau SFM), dan konservasi hutan di negaranya.

Pelibatan semua lapisan masyarakat di tingkat kabupaten merupakan salah satu kunci keberhasilan Brasil. Salah satu contoh adalah yang terjadi di Kota Paragonimas (setingkat kabupaten di Indonesia). Pada tahun 2008 pemerintah di Paragonimas menyelenggarakan suatu musyawarah besar yang melibatkan semua lapisan masyarakat mulai dari ibu rumah tangga,

kepala keluarga, lembaga swadaya masyarakat, sampai para pengusaha baik di bidang perikanan maupun bidang lainnya. Para pihak yang berkumpul itu kemudian menandatangani suatu kesepakatan bersama untuk menghentikan total penebangan kayu (*zero cutting*) dengan semangat "tidak ada satu pun dari kita yang diuntungkan dari kegiatan deforestasi". Konsep pembangunan kota Paragonimas ini disebut sebagai pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Gubernur Negara Bagian Pará menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh untuk sampai pada titik tersebut tidaklah mudah, dan merupakan proses panjang yang harus dilalui untuk tujuan bersama.

Bersama-sama Menanggulangi Emisi Gas Rumah Kaca

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia berbagi kabar terbaru tentang emisi karbon di Asia selama empat hari di Bandung, Jawa Barat (14-17 Maret 2011). Acara bertajuk *Asia Carbon Up Date* ini diselenggarakan untuk berbagi informasi, pengalaman, dan hikmah pembelajaran terkait inisiatif sejumlah negara Asia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu inisiatif yang menjadi

bahasan adalah skema Pengurangan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau REDD+).

Kegiatan yang dihadiri beberapa negara Asia dan lembaga internasional ini memiliki arti strategis karena merupakan yang pertama kali diselenggarakan di tingkat ini. Fokus forum ini adalah upaya mengurangi gas rumah kaca, terutama melalui skema REDD+, termasuk p e n g e m b a n g a n sistem Pengukuran, Pelaporan, dan

Verifikasi (*Measurement, Reporting, Verification* atau MRV), mekanisme pendanaan, dan pengembangan kapasitas untuk pelaksanaannya.

Salah satu pembicara utama dalam *Asia Carbon Up Date* ini adalah Bapak Yuyu Rahayu selaku National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bapak Yuyu Rahayu menyampaikan presentasi mengenai perkembangan terkini Inventori Hutan Nasional and Integrasi Gas Rumah Kaca. Disimpulkan pada akhir acara, bahwa upaya menanggulangi risiko emisi gas rumah kaca adalah tanggung jawab bersama semua negara, dan dibutuhkan langkah konkret untuk mencapai tujuan itu.



▲ Keterangan foto :



◀ Keterangan foto :

Penguatan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah

Sejak UN-REDD Programme Indonesia diluncurkan bulan Oktober 2010, terlihat bahwa perhatian dari para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah terhadap program tersebut sangat kuat. Diskusi-diskusi dengan berbagai pihak melahirkan gagasan perlu dibentuknya suatu wadah agar berbagai isu yang terkait REDD+ dapat ditanggapi dengan lebih efektif, dan potensi segenap pemangku kepentingan lebih terkoordinasi. Kelompok kerja (Pokja) REDD+ kemudian terbentuk dengan semangat mengakomodasi para pemangku kepentingan multi pihak, mengingat REDD+ menyangkut ruang lingkup peran banyak pihak. Keterwakilan mereka dalam Pokja REDD+ diharapkan membangun rasa kepemilikan atas pencapaian Pokja, terkait dengan aktivitas REDD+.

perempuan dalam Pokja tersebut. Untuk pemangku kepentingan lainnya, keterwakilannya ditentukan oleh tugas pokok dan fungsi yang melekat pada institusi-institusi terkait di Sulawesi Tengah. Keanggotaan Pokja lainnya diisi oleh perwakilan dari perguruan tinggi dan pihak swasta yang ada di Sulawesi Tengah.

Sebagai bentuk dukungan dan pengakuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Pokja REDD+, selain penetapan Pokja dengan



▲ Keterangan foto :

Keanggotaan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah mencakup berbagai kelompok masyarakat termasuk institusi pemerintah. Dalam penentuan perwakilan kelompok masyarakat adat/lokal dan lembaga swadaya masyarakat, mekanisme pemilihan ditentukan oleh mereka sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Menarik untuk disimak bahwa dalam prosesnya, konsolidasi dari kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat memerhatikan pula keterwakilan



Surat Keputusan—SK Gubernur Sulawesi Tengah no. 522/84/Dishutda – G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011—diadakan juga acara penguatan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Maret 2011. Gubernur Sulawesi Tengah berpesan agar Pokja REDD+ Sulawesi Tengah bersungguh-sungguh dalam mengemban amanat agar ketika REDD+ dijalankan di Sulawesi Tengah, mekanisme ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Harapan itu sangat sejalan dengan visi pembangunan keketahanan Indonesia, yakni: “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”.

Rapat Dewan Pengarah VI UN-REDD

Program UN-REDD, sebagai program kolaborasi Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB), memiliki Dewan Pengarah yang telah beberapa kali mengadakan rapat dan untuk yang keenam kalinya bertemu di Da Lat, Vietnam, 21 – 23 Maret 2011. Dewan Pengarah itu terdiri dari perwakilan negara-negara mitra, para donor, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Termasuk dalam Dewan sebagai pengamat adalah Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Forest Carbon Partnership Facility (World Bank), dan Sekretariat Global Environment Facility. Dewan Pengarah berperan memberikan panduan secara umum, arahan strategis, dan alokasi pendanaan untuk memastikan suksesnya program UN-REDD di dunia. Selain itu, Dewan ini juga bertugas meninjau progres kegiatan di negara-negara yang menerima alokasi dana.

Rapat Dewan Pengarah (*Policy Board Meeting* atau PBM) dilaksanakan 2 kali setahun. Pelaksanaan PBM pertama sampai keenam adalah Panama City (Panama), Montreux (Switzerland), Washington DC (Amerika Serikat), Nairobi (Kenya), Washington DC (AS), dan Da Lat (Vietnam). Untuk PBM ketujuh, rencananya akan dilaksanakan di Jerman bulan Oktober 2011.

Pada PBM keenam itu, Dr. Yetti Rusli (Staf Ahli Menteri bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) bersama wakil dari Badan PBB, Mr. Alexander Müller (FAO) berfungsi sebagai Co-Chairs. Selain Dr. Yetti Rusli, delegasi Indonesia diwakili Ir. Yuyu Rahayu, MSc (National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia), Ir. Laksmi Banowati, Msc (National Programme Manager UN-REDD Programme Indonesia), Ir. Susilowati, Msc (Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah), dan Ms. Silje Haughland (UNDP Jakarta).

Tujuan PBM kali ini antara lain:

- a. Membahas kriteria dan indikator proposal yang akan diajukan sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan



▲ Keterangan foto :



▲ Keterangan foto :

kegiatan-kegiatan yang akan dan sudah berjalan.

- b. Menyepakati proposal dari negara-negara yang baru mengajukan, serta mengusulkan kegiatan Program UN-REDD Global.

Lebih lanjut, presentasi pelaksanaan 7 (tujuh) program UN-REDD yang sudah berjalan (Bolivia, Indonesia, Panama, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, Vietnam, dan Zambia) memberikan gambaran capaian, tantangan, dan pembelajaran. Presentasi tentang progres di Indonesia disampaikan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan RI selaku National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia. UN-REDD Programme Indonesia menyampaikan bahwa capaiannya antara lain tersusunnya Rekomendasi Kebijakan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC)



▲ Keterangan foto :

oleh Dewan Kehutanan Nasional, serta Rancangan Strategi Nasional REDD+ yang telah disampaikan ke Satuan Tugas REDD+ Nasional untuk disempurnakan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang
UN-REDD Programme Indonesia
kunjungi : www.un-redd.or.id

Rekomendasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan



▲ Keterangan foto :

UN-REDD Programme Indonesia selama ini aktif mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya yang menuju kesuksesan implementasi REDD+ di Indonesia. Salah satu upaya yang menjamin implementasi REDD+ yang adil, setara, dan transparan adalah prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC). Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan atau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat itu.

Untuk mencapai konsensus perumusan mekanisme FPIC REDD+ yang menjamin hak para pemangku kepentingan, UN-REDD Programme Indonesia bersama Dewan Kehutanan Nasional (DKN) telah melakukan serangkaian lokakarya dan konsultasi yang melibatkan kamar pemerintah, kamar masyarakat adat dan komunitas lokal, kamar akademisi, kamar swasta, serta kamar lembaga swadaya masyarakat. Rangkaian

konsultasi multipihak itu kemudian melahirkan Rumusan *Rekomendasi Kebijakan FPIC Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*. Para pemangku kepentingan multipihak itu berharap bahwa hasil-hasil pertemuan tersebut dapat diolah menjadi kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia, khususnya masyarakat yang terkena dampak langsung pelaksanaan REDD+. Oleh sebab itu, Rumusan tersebut diluncurkan dan diserahkan kepada para pemangku kepentingan di lingkup Satuan Tugas REDD+, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI), Kementerian Lingkungan Hidup RI, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional di Gedung Djuang, Jakarta (17 Maret 2011). Dengan diteruskannya

rekomendasi kebijakan itu, diharapkan para pemangku keputusan mendukung pelaksanaan FPIC yang sesuai konteks masyarakat yang terkena dampak langsung implementasi REDD+ di Indonesia.

▼ Keterangan foto :



Konsultasi Peta Jalan Kehutanan di Kalimantan Tengah

Selama satu hari (7 April 2011) di Samarinda, Kalimantan Tengah, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia menggelar konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait Rancangan Peta Jalan (*Road Map*) Pembangunan Kehutanan berbasis hutan tanaman dan taman nasional. Konsultasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dan dihadiri antara lain oleh para pakar dari Universitas Mulawarman, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

Meskipun peserta konsultasi memberikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Kehutanan RI menyusun Peta Jalan Pembangunan Kehutanan ini, mereka juga

mengungkapkan beberapa isu penting yang perlu diakomodasi di dalam Peta Jalan. Hal ini terkait dengan kepastian lahan atau kawasan yang merupakan salah satu syarat pengelolaan hutan lestari. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih penggunaan lahan antara sektor kehutanan dengan sektor perkebunan dan pertambangan yang melibatkan Kementerian Kehutanan RI dan pemerintah daerah.

Peserta juga menggambarkan konflik di lapangan yang masih banyak terjadi antara pemegang izin dengan masyarakat lokal dan/atau pemerintah daerah, di samping konflik antara masyarakat lokal dan masyarakat lokal lainnya seperti di Kabupaten Kutai Barat. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan

RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI) dan pemerintah daerah (kabupaten). Hal ini menyebabkan tumpang tindih kawasan area pengguna lahan dan batas kampung dengan areal hutan tanaman.

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kehutanan ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja (*pro job*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*), dengan tetap memerhatikan lingkungan hidup (*pro environment*). Dengan kata lain, Peta Jalan ini bisa menjadi kompas untuk memaksimalkan potensi sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, juga mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pertemuan Kedua Programme Executive Board UN-REDD Programme Indonesia

UN-REDD Programme Indonesia untuk kedua kalinya mengadakan Rapat Dewan Eksekutif untuk membahas progres program dan peran para pemangku kepentingan terkait (Jakarta, 12 Mei 2011).



▲ Keterangan foto :

Sangatlah penting untuk melakukan konsolidasi dan menyamakan visi untuk memastikan kesuksesan sebuah program. Dengan tujuan itu, Dewan Eksekutif UN-REDD Programme Indonesia yang terdiri dari Programme Management Unit (PMU), Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, perwakilan-perwakilan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP) duduk bersama membahas progres dan rencana kerja aktivitas program. Hadir pula pada kesempatan ini Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Mr. Eivind S. Homme.

Sesuai kesepakatan pada Rapat Dewan Eksekutif Pertama (Januari 2011), Dewan

Eksekutif memasukkan perwakilan dari masyarakat adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN) dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+. Pada pertemuan ini, untuk pertama kalinya hadir Bapak Tahir Tanaka dari AMAN, dan Bapak Heru Prasetyo dari Satgas REDD+ Nasional. Dr. Yetti Rusli (Staf Ahli Menteri bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI) mewakili Bapak Bambang Soepijanto (Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI) dan Mr. El-Mostafa Benlamlih (UN Resident Coordinator) berperan sebagai *Co-Chairs* pada rapat kali ini.

Beberapa isu penting yang diangkat adalah mengenai upaya mengaitkan program percontohan UN-REDD Programme Indonesia di Palu (Sulawesi Tengah) dengan program pemerintah Indonesia (*Government of Indonesia*

atau Gol) yang didanai oleh Norwegia melalui *Letter of Intent* (LoI). Selain itu, ditekankan juga bahwa UN-REDD Programme Indonesia dirasa perlu melanjutkan komitmennya hingga 2012 untuk mendukung kesuksesan REDD+ di Indonesia. Heru Prasetyo berkata, "Menciptakan contoh sukses REDD+ adalah tanggung jawab kita bersama. Diharapkan UN-REDD Programme Indonesia tidak berhenti di tahun 2012 karena bersama, kita dapat menjadi kekuatan yang mensukseskan program REDD+ di Indonesia." Selanjutnya, komitmen untuk mensukseskan Program disepakati melalui *Minutes of Meeting* (MoM). Diputuskan pula bulan September 2011 sebagai jadwal pertemuan Dewan Eksekutif Ketiga untuk meninjau pencapaian Program.

Penghargaan Climate Change Indonesia 2011 Education Forum and Expo

Penanggulangan perubahan iklim dirasakan sudah semakin mendesak. Kebutuhan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya adaptasi maupun penanggulangan itu juga semakin dirasa penting. Oleh sebab itu, pada tanggal 26 – 29 Mei 2011 Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengadakan kegiatan pameran dan seminar dengan tema sentral "*Climate Change Indonesia 2011 Education Forum & Expo*" di Jakarta Convention Center. Pada kesempatan ini, DNPI mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, termasuk UN-REDD Programme Indonesia. Keikutsertaan UN-REDD Programme Indonesia selain meningkatkan pengetahuan publik tentang UN-REDD Programme Indonesia dan kegiatan-kegiatannya, juga membantu penyebaran informasi tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim. Acara dibuka oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, *His Excellency* Eivind S. Homme dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

Partisipasi UN-REDD Programme Indonesia kali ini selain sekali lagi mendukung stan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) melalui kerja sama dengan Pusat Standardisasi Lingkungan (Pustanling), juga memberi informasi langsung melalui stan UN-REDD Programme Indonesia sendiri. Stan UN-REDD Programme Indonesia sempat dimeriahkan dengan penampilan musik yang cukup menarik pengunjung. Selain itu, tampak juga ketertarikan para pelajar dan kaum muda yang mengunjungi stan dan



menjawab kuis berhadiah. Di akhir acara, berkat komitmen staf UN-REDD Programme Indonesia menyajikan materi yang menarik dan berinteraksi dengan pengunjung, panitia pameran menghadihkan penghargaan pertama kategori badan/lembaga dunia. Diharapkan partisipasi semacam ini dapat memberikan dampak positif pada edukasi publik tentang perubahan iklim.



Kata Meraka



Heru Prasetyo,
Sekretaris Satuan Tugas Nasional REDD+:

"Ketika Presiden memberikan tanggung jawab kepada Pak Kuntoro (Mangkusubroto) dan saya untuk menangani REDD+, saya merasa seperti diterjunkan dari helikopter ke laut lepas dan tidak bisa berenang. Hal itu cukup menakutkan, untungnya UN-REDD Programme Indonesia menyelamatkan kami. Tanpa UN-REDD Programme Indonesia, Satuan Tugas Nasional REDD+ tak akan mampu berenang di lautan itu. UN-REDD Programme Indonesia telah membantu kami dan melakukan banyak hal dengan pemangku kepentingan multipihak."

REDD+ dan Tokoh-tokoh Agama

Apakah hubungan antara tokoh agama dan pelestarian hutan? Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan penting bagi kaum manusia. Sebagai kaum yang mengambil manfaat dari hutan, manusia berkewajiban memelihara alam sesuai kepercayaan masing-masing. Pengurangan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau REDD+) adalah salah satu mekanisme pemeliharaan hutan yang dimaksud. Oleh sebab itu, mendukung kesuksesan REDD+ berarti berpartisipasi memelihara alam untuk kehidupan.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, diperlukan upaya penyadartahuan oleh pihak-pihak yang berpengaruh di masyarakat. Salah satu pihak yang dirangkul oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kehutanan (RI) bekerja sama dengan UN-REDD Programme Indonesia adalah para tokoh agama. Melalui acara komunikasi publik bertajuk "Peran Tokoh Agama dalam Pengurangan Dampak Perubahan Iklim" yang diadakan tanggal 15 Juni 2011 di Manggala Wanabakti, para pelaku REDD+ memberikan presentasi dan

meyakinkan para tokoh agama untuk berpartisipasi mensukseskan program REDD+ di Indonesia. Acara dibuka oleh Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Hadir pula Sekretaris Satuan Tugas REDD+ Nasional, Heru Prasetyo.

Beberapa presentasi disajikan di acara tersebut dan menjadi hikmah pembelajaran bagi semua peserta. Sebagai bentuk komitmen peserta yang sebagian besar merupakan tokoh agama, ditandatangani deklarasi bersama yang isinya mendukung upaya global penanggulangan dampak emisi gas rumah kaca. Mewakili 5 (lima) dari 6 (enam) agama resmi di Indonesia, 5 (lima) tokoh dari setiap agama menandatangani deklarasi itu. Para penandatanganan yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Hadi Daryanto, adalah Rusli, SH (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Muhjidin Mawardi (Muhammadiyah), Kris Tan (Generasi Muda Khonghucu Indonesia), dan Hendri (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia). Komitmen itu diharapkan menjadi langkah awal membimbing masyarakat Indonesia menuju pelestarian alam, khususnya hutan.

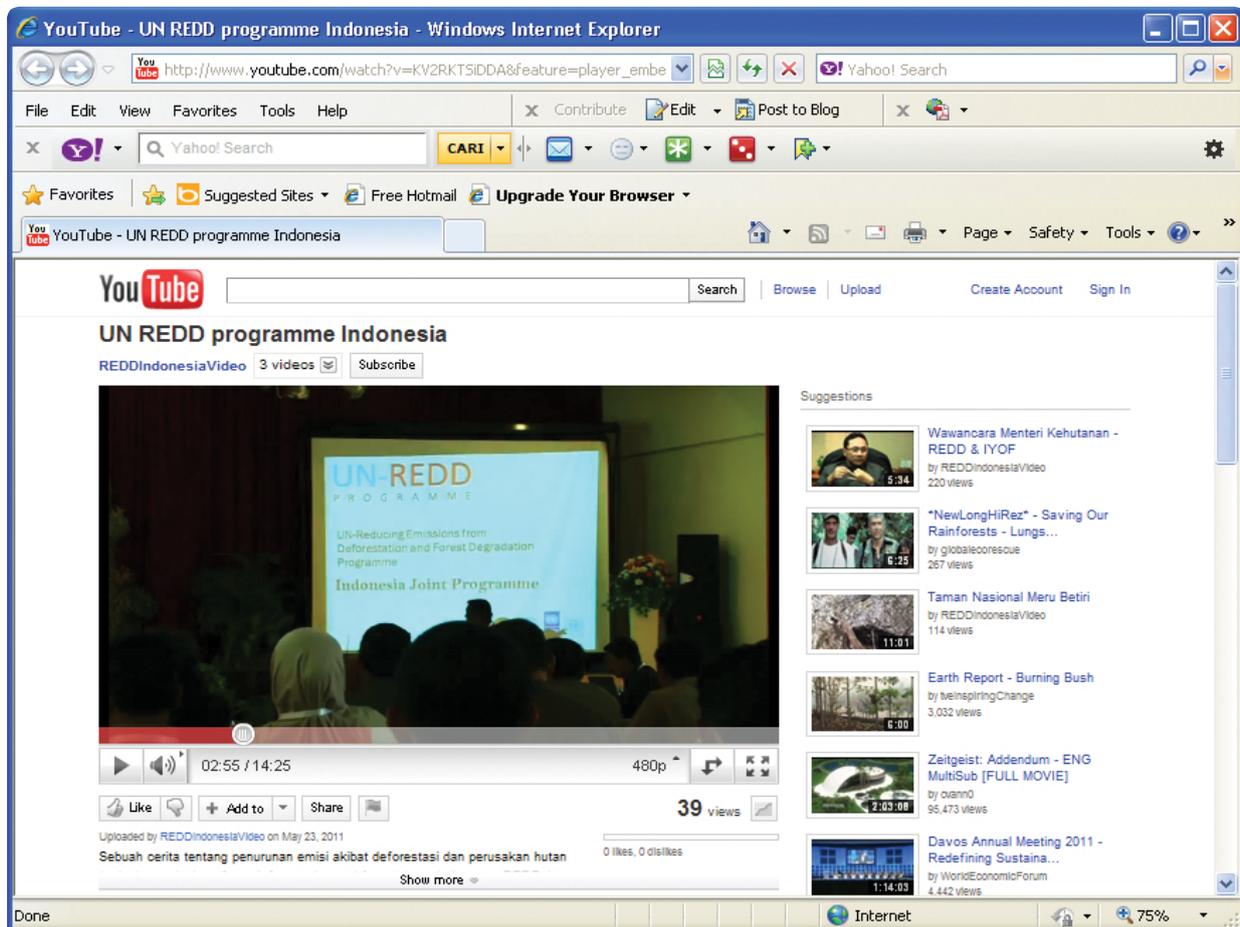


Kabar UN-REDD Programme Indonesia

Telah berpulang ke Yang Maha Kuasa, Dr. Benny H. Sormin, staf Food Agriculture Organization (FAO) Jakarta, pada tanggal 30 April 2011. Kami menyampaikan belasungkawa dan simpati yang sedalam-sedalamnya kepada keluarga Almarhum. Semoga arwah Almarhum berada dalam damai, dan keluarganya diberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan ini.

Publikasi Terbaru

Film **UN-REDD Programme Indonesia** tentang hubungan masyarakat dan REDD+ kini hadir untuk publik. Anda bisa melihat film tersebut di www.youtube.com dengan alamat akses http://www.youtube.com/watch?v=KV2RKTsiDDA&feature=player_embedded



Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5795 1505
Faks: +62 21 574 6748

Atau silakan kirim email ke :

nanda.febriani@un-redd.or.id

Kerja sama antara:



UN-REDD
PROGRAMME
The United Nations Collaborative Programme
on Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation in Developing Countries

